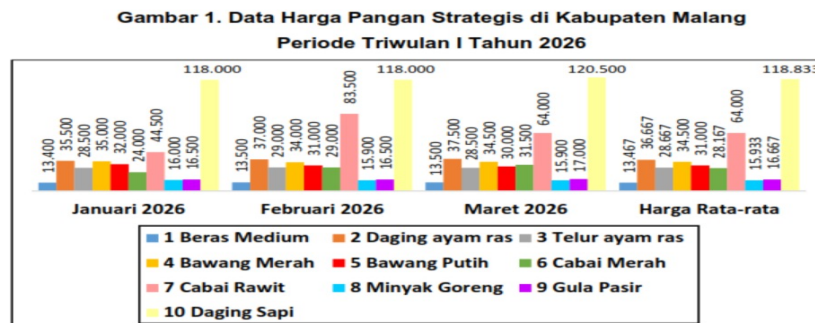


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Data harga komoditas pangan strategis periode triwulan I tahun 2026, sebagaimana grafik berikut:



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang 2026 (diolah)



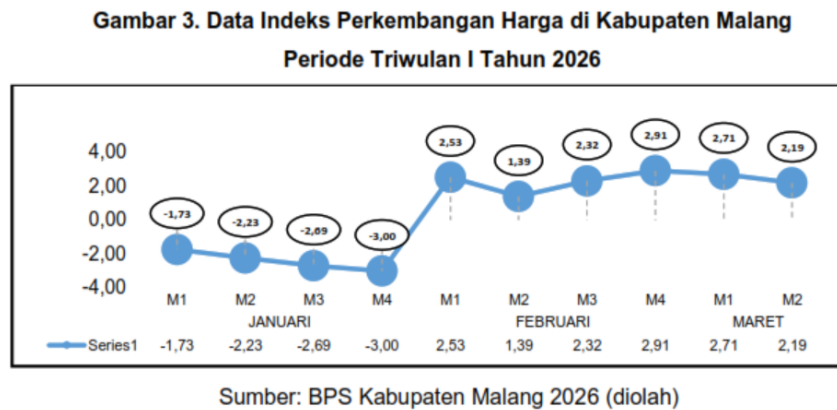
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2026 (diolah)

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas, fluktuasi harga komoditas pangan strategis selama periode Triwulan I tahun 2026 di Kabupaten Malang, berikut analisis terhadap perkembangan harga:

- a. Kenaikan harga terjadi pada Januari ke Februari, yang kemudian diikuti stabilisasi atau koreksi pada Maret untuk beberapa komoditas. Komoditas pokok seperti beras medium relatif stabil pada kisaran Rp13.400 di Januari dan Rp13.500 pada Februari-Maret. Minyak goreng juga menunjukkan pergerakan terbatas dari Rp16.000 menjadi Rp15.900, sedangkan gula pasir berada pada kisaran Rp16.500 dan sedikit naik menjadi Rp17.000 di Maret. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan pasokan dan distribusi berjalan cukup baik serta intervensi pemerintah efektif menjaga harga tetap terkendali;
- b. Pada kelompok protein hewani, daging ayam ras meningkat dari Rp35.500 pada Januari menjadi Rp37.000 di Februari dan Rp37.500 di Maret. Telur ayam ras bergerak dari Rp28.500 ke Rp29.000, lalu kembali ke Rp28.500, menunjukkan pola kenaikan moderat yang kemudian stabil. Sementara itu, harga daging sapi Rp118.000 pada Januari-Februari dan meningkat menjadi Rp120.500 pada Maret;
- c. Di sisi lain, komoditas hortikultura, khususnya cabai merah dan cabai rawit, menjadi penyumbang volatilitas terbesar. Harga cabai merah naik dari Rp24.000 pada Januari menjadi Rp29.000 di Februari dan kembali meningkat ke Rp31.500 pada Maret. Adapun cabai rawit mengalami lonjakan tajam dari Rp44.500 menjadi Rp83.500 pada Februari, sebelum turun ke Rp64.000 di Maret. ;
- d. Secara keseluruhan, risiko inflasi pangan pada Triwulan I 2026 lebih dominan dipengaruhi oleh komoditas hortikultura dan daging sapi, sementara komoditas lainnya

relatif terkendali. Oleh karena itu, upaya pengendalian inflasi ke depan perlu difokuskan pada penguatan pasokan hortikultura, peningkatan kelancaran distribusi, serta intervensi yang tepat sasaran pada komoditas dengan tingkat volatilitas tinggi.

Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Malang periode triwulan I tahun 2026, sebagaimana grafik berikut:



Berdasarkan Gambar 3 di atas, pada Triwulan I Tahun 2026 kondisi harga pangan di Kabupaten Malang secara umum menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun masih berada dalam kondisi yang terkendali. Adapun analisis relevansi Indeks Perubahan Harga (IPH) dan perkembangan harga komoditas pangan strategis pada Triwulan I Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

- Pada bulan Januari, perkembangan harga menunjukkan kecenderungan deflasi yang semakin dalam dari minggu ke minggu, yaitu dari -1,73% pada M1 hingga -3,00% pada M4. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh turunnya harga cabai rawit dengan andil negatif yang cukup besar (mencapai 1,3817), diikuti cabai merah (-0,9476) dan daging ayam ras (-0,4475). Pada awal periode, beras juga turut memberikan kontribusi terhadap deflasi. Secara umum, kondisi ini mencerminkan ketersediaan pasokan yang melimpah serta distribusi yang relatif lancar;
- Memasuki bulan Februari, terjadi perubahan yang cukup signifikan, di mana IPH berbalik menjadi inflasi dengan kisaran 1,39% hingga 2,91%. Kenaikan ini didominasi oleh cabai rawit yang memberikan andil sangat tinggi (hingga 3,2460), disertai kontribusi dari daging ayam ras (0,7565) serta komoditas lain seperti bawang putih dan gula pasir dalam skala yang lebih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan adanya gangguan pasokan di tengah tingginya permintaan pada momen Ramadhan 2026, yang menyebabkan tekanan harga terutama pada komoditas hortikultura.
- Pada bulan Maret, tekanan inflasi masih berlanjut, namun menunjukkan indikasi stabilisasi. IPH tercatat sebesar 2,71% pada M1 dan menurun menjadi 2,19% pada M2. Cabai rawit tetap menjadi penyumbang utama inflasi, meskipun dengan andil yang mulai menurun (dari 1,0649 menjadi 0,8132), diikuti oleh daging ayam ras serta tambahan kontribusi dari telur ayam ras dan cabai merah. Hal ini mencerminkan bahwa pasokan mulai membaik, meskipun belum sepenuhnya stabil.
- Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa pergerakan inflasi daerah masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit, yang menjadi faktor dominan dalam membentuk tekanan harga baik saat deflasi maupun inflasi. Oleh karena itu, upaya pengendalian inflasi ke depan perlu diarahkan pada penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengendalian volatilitas harga komoditas hortikultura, agar stabilitas harga dapat terjaga secara berkelanjutan.

dan daya beli masyarakat tetap terlindungi .

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan perkembangan harga komoditas pangan strategis dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Triwulan I Tahun 2026 di Kabupaten Malang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Tingginya volatilitas harga komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit dan cabai merah, yang menunjukkan fluktuasi sangat tajam dalam waktu relatif singkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan pasokan, pola tanam, serta mitigasi terhadap risiko musim dan cuaca masih perlu dioptimalkan.
- b. Ketidakseimbangan pasokan antar waktu, di mana pada bulan Januari terjadi kelebihan pasokan yang mendorong deflasi, sementara pada Februari terjadi keterbatasan pasokan di tengah peningkatan permintaan, sehingga memicu inflasi yang cukup tinggi.
- c. Di sisi lain, sistem distribusi komoditas pangan, khususnya untuk komoditas yang mudah rusak, masih menghadapi kendala yang berdampak pada percepatan kenaikan harga di tingkat konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kelancaran distribusi, efisiensi rantai pasok dan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi gejolak harga masih perlu diperkuat sehingga respons kebijakan masih cenderung bersifat reaktif.
- d. Permasalahan lain yang turut teridentifikasi adalah adanya tekanan harga yang bersifat struktural, khususnya pada komoditas daging sapi yang cenderung mengalami kenaikan lebih disebabkan oleh tingginya permintaan pada momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.
- e. Secara keseluruhan, permasalahan yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pengendalian inflasi daerah masih menghadapi tantangan pada aspek ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga komoditas hortikultura. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih terintegrasi dan antisipatif guna menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Malang yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan I 2026 oleh TPID Kabupaten Malang berdasarkan Strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif) Pengendalian Inflasi, antara lain:

▪ Keterjangkauan

1. Dalam rangka menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, serta daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Malang menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah Lebaran Tahun 2026 yang secara resmi dibuka oleh Bupati Malang pada tanggal 13 Maret 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah melalui intervensi langsung pada distribusi dan harga komoditas pangan strategis, khususnya yang mengalami peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan.

2. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah pada Februari dan Maret 2026 dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat, khususnya pada periode dengan potensi peningkatan permintaan. Kegiatan ini turut menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengendalian inflasi daerah melalui intervensi pasar yang tepat sasaran, sekaligus meningkatkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan distribusi berjalan lancar, harga tetap terkendali, dan daya beli masyarakat terjaga.
3. Bupati Malang mendampingi kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, ke Kabupaten Malang pada 4 Maret 2026 untuk meninjau progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, guna memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program KNMP mencakup sekitar 20 intervensi pembangunan sarana prasarana, antara lain cold storage, pabrik es, dermaga, dan SPBU nelayan, yang bertujuan mendukung efisiensi operasional, menjaga kualitas hasil tangkapan, serta memperlancar distribusi, sehingga potensi perikanan dapat dioptimalkan dan berdampak pada peningkatan produktivitas, taraf hidup, serta sarana kerja nelayan secara berkelanjutan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pada 24 Februari 2026 dalam rangka meninjau kondisi bangunan serta kesiapan sarana dan prasarana koperasi. Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan operasional KDMP sebagai penggerak perekonomian desa dan penguat ketahanan pangan, melalui perannya dalam mendukung distribusi pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Bupati Malang mendampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam kegiatan Pasar Murah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Taman Pelangi, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, pada 22 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan upaya strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, khususnya menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat. Melalui pelaksanaan pasar murah, masyarakat memperoleh akses terhadap komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah serta menjaga daya beli masyarakat.
6. Pemantauan stok dan harga gula di PT PG Rajawali I (PG Kreet) Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang pada 9 Februari 2026 dipimpin Deputi Bapanas merupakan bagian dari Satgas Saber Pangan untuk memastikan stabilitas harga, mutu, dan keamanan pangan menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H melalui pengawasan HPP, HET, dan HAP. Hasilnya, harga gula dari produsen hingga ritel masih di bawah HET Rp17.500 (D1 Rp14.850; D2 Rp14.950; ritel Rp16.200) dengan stok mencapai 13.316,91 ton sehingga kondisi pasokan aman.
7. Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Malang bersama Bapanas dan Satgas Pangan Polres Malang melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Pantauan SP2KP UPPD Kepanjen yang dipimpin oleh perwakilan Bapanas pada 9 Februari 2026; hasilnya menunjukkan harga bahan pokok menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H relatif stabil tanpa kenaikan signifikan, kecuali cabai rawit yang naik akibat faktor cuaca

sehingga siklus panen tidak stabil.

8. Monitoring terpadu TPID Kabupaten Malang bersama Satgas Pangan Polres Malang pada 13 Maret 2026 di UPPD Kepanjen dalam rangka pengawasan ketersediaan, stabilitas harga, dan mutu bahan pokok penting di wilayah Kabupaten Malang untuk memastikan distribusi berjalan lancar, mencegah potensi penimbunan maupun praktik perdagangan yang tidak sesuai ketentuan, serta menjaga keterjangkauan harga dan kualitas komoditas guna mendukung stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi daerah.
9. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pasar Murah Lebaran 1447 H pada 06 Maret 2026 di Ruang Rapat Anusapati, Lt. 2, Jl. Merdeka Timur No. 3 Malang dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Selain itu, pada hari yang sama juga dilaksanakan monitoring Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, ketersediaan bahan pangan mencukupi, serta harga tetap stabil di tingkat konsumen.
10. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok (bapok) di pasar rakyat dan distributor oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Dari 34 UPPD, sebanyak 21 UPPD dijadikan sampel, dengan hasil berupa laporan harian perkembangan harga 20 komoditas bahan pokok yang diinput secara rutin setiap hari ke Platform SIHARKEPO Kab. Malang, SISKAPERBAPO Prov. Jawa Timur, SP2KP Kementerian Perdagangan dan Wasinflasi Kemendagri melalui Inspektorat Kabupaten Malang.
11. Monitoring data harga harian bahan pokok dan barang penting lainnya melalui SP2KP Kementerian Perdagangan dan SIHARKEPO Kabupaten Malang dilakukan secara konsisten untuk memastikan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi, sekaligus melalui proses verifikasi dan validasi guna mendukung identifikasi tren, deteksi gejala, serta perumusan intervensi yang tepat dan responsive.
12. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan workshop, bimbingan teknis koperasi/UMKM, dan job fair, serta monitoring pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan pemantauan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada periode Januari-Maret 2026, termasuk pembentukan Posko Pengaduan THR pada 19 Februari-18 Maret 2026; hasil pelaksanaan menunjukkan pembayaran upah sesuai ketentuan UMK dan THR tepat waktu telah terpenuhi, dengan kendala keterbatasan jangkauan monitoring akibat banyaknya perusahaan yang diatasi melalui penguatan koordinasi dengan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan, sehingga berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
13. Penyaluran bantuan pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Malang pada bulan Maret 2026 dilaksanakan secara menyeluruh kepada masyarakat di berbagai wilayah sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan daya beli, khususnya pada periode meningkatnya kebutuhan. Total bantuan yang disalurkan mencapai 6.419.640 kg beras dan 1.258.436 liter minyak goreng, yang didistribusikan secara bertahap dan terkoordinasi guna memastikan ketepatan sasaran serta kelancaran penyaluran. Program ini diharapkan mampu membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.

▪ **Ketersediaan**

1. Bupati Malang menghadiri Panen Perdana dan Gerakan Menanam Padi Unggul oleh HKTI Kabupaten Malang di Desa Tanggung, Kecamatan Turen, pada 7 Januari 2026 sebagai upaya penguatan produksi pangan sektor hulu pertanian untuk meningkatkan produktivitas pangan, sekaligus mendukung sinergi pemerintah daerah dan kelompok tani dalam menjaga ketahanan pangan serta pengendalian inflasi dari sisi pasokan.
2. Bupati Malang bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, didampingi Asisten

Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, meninjau operasional mesin Rice Polisher (KEBI) Bantuan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang berkapasitas 2-3 ton per jam di Gapoktan Amarta Padi, Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, pada 14 Januari 2026 sebagai bagian upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pengolahan gabah menjadi beras, sehingga mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing beras lokal, sekaligus memperkuat produksi pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Malang.

3. Wakil Bupati Malang bersama Tim Investasi Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) melaksanakan kegiatan pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait praktik pertanian berkelanjutan, meliputi penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, serta teknik pembenahan tanah. Kegiatan ini diselenggarakan di Balai Desa Gubuklakah, Kecamatan Poncokusumo, pada 6 Februari 2026, sebagai upaya meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan secara produktif dan ramah lingkungan. Melalui kegiatan ini, diharapkan petani mampu mengoptimalkan hasil produksi, menjaga kesuburan tanah, serta mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Rapat koordinasi penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang diselenggarakan bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang dan dinas terkait lainnya, 05 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun perencanaan ketersediaan dan kebutuhan pangan secara komprehensif berbasis data, dengan mempertimbangkan aspek produksi, konsumsi, distribusi, serta potensi kerawanan pangan. Melalui forum ini, dilakukan sinkronisasi data dan proyeksi antar perangkat daerah guna memastikan kecukupan pasokan pangan sepanjang tahun serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi dari sisi ketersediaan.
5. Rapat koordinasi lanjutan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026 sebagai bagian dari proses pemutakhiran data dan penyempurnaan perencanaan pangan daerah, 25 Februari 2026. Kegiatan ini menekankan pentingnya akurasi data dalam mendukung pengambilan kebijakan, serta memperkuat sinergi antar instansi dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, merata, dan berkelanjutan.
6. Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) pada 3 Maret 2026 di Kantor Dinas TPHP Kabupaten Malang membahas persiapan awal produksi benih sumber dan benih komersial varietas unggul padi SUKMA, sebagai tindak lanjut hasil sidang pelepasan varietas di Cipayung, Bogor (11 Februari 2026). FGD ini menitikberatkan pada penguatan sistem perbenihan melalui identifikasi kebutuhan, kesiapan sarana prasarana, serta koordinasi pemangku kepentingan guna menjamin ketersediaan benih unggul yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
7. Pada periode Triwulan I 2026, Bagian Sumber Daya Alam Setda melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pembinaan kepada penyuluh, kelompok tani, peternak, dan nelayan melalui pemantauan kebijakan serta pengkajian data untuk mengidentifikasi permasalahan dan memperoleh data terkini populasi serta produksi ternak. Selain itu, juga dilaksanakan fasilitasi kemitraan dengan swasta, BUMD, dan koperasi guna mengoptimalkan distribusi pupuk subsidi hingga tingkat petani sesuai ketentuan, dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Malang.

▪ Kelancaran Distribusi

1. Dalam rangka mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat, Bupati Malang menghadiri sekaligus meresmikan Jembatan Gantung Garuda yang berlokasi di Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung pada tanggal 9 Maret 2026.

Pembangunan jembatan ini menjadi infrastruktur strategis yang menghubungkan dua wilayah, yakni Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung dengan Desa Mangunrejo di Kecamatan Kepanjen, sehingga memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Malang.

2. Bupati Malang meresmikan Jembatan Madakaripura di Dusun Sumber Agung, Desa Bandungrejo, Kecamatan Bantur pada 28 Januari 2026 sebagai bagian upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperlancar distribusi logistik dan mobilitas masyarakat guna mendukung aktivitas perekonomian daerah.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang menghadiri acara tasyakuran pembukaan jalan lingkaran baru di kawasan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari pada 31 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur atas selesainya pembangunan infrastruktur jalan yang diharapkan dapat meningkatkan kelancaran aksesibilitas dan mobilitas di kawasan strategis peternakan.
4. Pada Triwulan I Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas PU Binamarga melaksanakan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan akses jalan penghubung antarwilayah yang tersebar di seluruh wilayah sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan kelancaran distribusi, mencakup rehabilitasi jalan kabupaten dengan kondisi rusak ringan sepanjang 0,415 km serta pemeliharaan jalan kabupaten dengan kondisi rusak sedang hingga baik sepanjang 28,850 km serta pemeliharaan jalan berlubang sepanjang 70,800 km yang diarahkan untuk menjaga kemantapan jalan, memperpanjang usia layanan infrastruktur, dan meminimalkan hambatan arus logistik.
5. Program Mudik Gratis Lebaran 2026 sebanyak 385 peserta diberangkatkan oleh Bupati Malang dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, khususnya pada aspek keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi dimana fasilitasi transportasi ini membantu menekan pengeluaran masyarakat pada periode permintaan tinggi, sehingga menjaga daya beli, serta berpotensi mengurangi lonjakan tarif angkutan dan kepadatan arus mudik yang dapat mengganggu distribusi barang, sehingga stabilitas harga tetap terjaga.

▪ **Komunikasi Efektif**

1. Bupati Malang menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Gedung Negara Graha, Surabaya, pada 26 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, serta percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kehadiran Bupati Malang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi sebagai penguatan ekonomi daerah.
2. Melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang pada 04 Maret 2026, membahas perkembangan harga bahan pokok dan barang penting menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi daerah melalui sinergi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal. Dalam HLM tersebut disepakati langkah-langkah konkret, antara lain penguatan operasi pasar, optimalisasi distribusi, serta peningkatan pengawasan terhadap ketersediaan dan harga komoditas strategis.
3. Mengikuti secara rutin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya menjaga stabilitas harga melalui pemantauan, evaluasi intervensi, dan penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan, termasuk dukungan program nasional; serta kesiapsiagaan menghadapi Idul Fitri 1447 H melalui penguatan distribusi, pemantauan stok, intervensi pasar, dan peningkatan efektivitas

pengendalian inflasi daerah.

4. Ikut serta pada kegiatan Capacity Building TPID se-Jawa Timur dalam rangka persiapan Penilaian TPID Award Nasional Tahun 2026 sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas program kerja dan kompetensi TPID dalam pemenuhan Kriteria TPID Award Nasional, Kamis-Jumat 29 - 30 Januari 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure Malang Jl. Raden Panji Suroso no.7 Purwodadi Kota Malang.
5. Updating data harga sembako setiap hari pada UPPD Turen, Singosari, Lawang, Karangploso dan Kepanjen serta 21 UPPD melalui platform SP2KP Kementerian Perdagangan, SISKAPERBAPO Provinsi Jawa Timur dan SIHARKEPO Kabupaten Malang
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Malang secara rutin melaksanakan input data harga harian atas 20 komoditas bahan pokok strategis serta mengunggah bukti dukung atas berbagai upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan TPID Kabupaten Malang periode TW I Tahun 2026 ke laman resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pemantauan pengendalian inflasi daerah sesuai arahan pemerintah pusat, serta memperkuat transparansi dan respons pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) secara umum telah berjalan cukup baik dan mampu menjaga stabilitas harga pada sebagian besar komoditas pangan strategis di Kabupaten Malang selama Triwulan I Tahun 2026. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek stabilisasi komoditas yang bergejolak (volatil) serta peningkatan efektivitas sistem pendukung agar pengendalian inflasi dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.
- b. Intervensi pada aspek keterjangkauan melalui pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah terbukti efektif dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya pada periode meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta memberikan akses pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat rentan.
- c. Penguatan ketersediaan pasokan melalui peningkatan produksi pertanian, pelaksanaan panen, penyusunan proyeksi neraca pangan, serta dukungan sarana prasarana seperti alat pengolahan hasil pertanian, telah berkontribusi dalam menjaga kesinambungan pasokan dan mengurangi potensi kelangkaan komoditas.
- d. Upaya peningkatan kelancaran distribusi melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta penguatan konektivitas antar wilayah terbukti mendukung efisiensi distribusi barang dan menekan potensi disparitas harga antar wilayah.
- e. Aspek komunikasi efektif melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID, rapat koordinasi rutin, serta pemantauan harga berbasis data harian memperkuat sinergi lintas sektor dan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan berbasis data.
- f. Namun demikian, pengendalian inflasi masih menghadapi tantangan signifikan berupa tingginya volatilitas harga komoditas hortikultura, khususnya cabai merah dan cabai rawit, yang dipengaruhi oleh faktor musiman, cuaca, serta ketidakseimbangan pasokan dan permintaan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kebijakan TPID Kabupaten Malang Triwulan I Tahun 2026, guna meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi yang berkelanjutan, diperlukan penguatan

langkah strategis yang bersifat korektif dan adaptif dalam merespons dinamika harga dan pasokan, antara lain sebagai berikut:

- a. Memperkuat stabilisasi komoditas hortikultura melalui pengaturan pola tanam berbasis kalender tanam terpadu, pengembangan kawasan sentra produksi (klaster), serta peningkatan kapasitas petani dalam mitigasi risiko perubahan cuaca dan musim.
- b. Mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) sebagai instrumen pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga keseimbangan pasokan antarwilayah dan mengurangi disparitas harga komoditas strategis.
- c. Memperkuat sistem distribusi dan efisiensi rantai pasok melalui peningkatan infrastruktur logistik, digitalisasi distribusi, serta optimalisasi peran Kios Pangan BUMDesma/POKTAN, swasta, dan koperasi sebagai agregator dan distributor pangan.
- d. Melanjutkan intervensi pasar seperti Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah secara lebih terarah, terjadwal, dan berbasis lokasi prioritas, terutama pada periode rawan inflasi seperti HBKN.
- e. Memperkuat koordinasi TPID melalui HLM, meningkatkan frekuensi monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala, serta penguatan sinergi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal.
- f. Mendorong peningkatan literasi dan komunikasi publik terkait perkembangan harga dan ketersediaan pangan guna menjaga ekspektasi masyarakat serta mendukung stabilitas harga.
- g. Mengembangkan kebijakan jangka menengah dan panjang yang terintegrasi antara sektor hulu dan hilir guna menciptakan sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.